



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AMIN NUR
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 732656

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.340.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 404.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA XIH02N35M1 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV RS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 63.300.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 593.987.341

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.401.287.341

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.401.287.341

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SUWARNY SUMARDI  
NIK : 7371124511830002  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN  
SEREALIA  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 27 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NOVIA EKA RAHAYU  
NIK : 7371056411830001  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN  
SEREALIA  
Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR  
Jenis Laporan : Khusus - Akhir Menjabat  
Tanggal Kirim : 26 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ANDI ICHWAN IBRAHIM  
NIK : 7371101112820006  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN  
SEREALIA  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 9 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : LUSIYANA POMBO  
NIK : 7309124802730002  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN  
SEREALIA  
Jabatan : BENDAHARA PENERIMA  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 16 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MUHTAR  
NIK : 7309121209710001  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN  
SEREALIA  
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 7 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.